

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini, kebutuhan serta tantangan untuk bertahan hidup menjadi semakin berat. Kebutuhan yang semakin bertambah banyak berbanding terbalik dengan kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, karena Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang terbatas. Hal ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi usia kanak-kanak pun mendapatkan dampak sosial yang menyebabkan permasalahan sosial yang terjadi pada saat ini.

Terdapat beberapa permasalahan sosial yang berkaitan dengan anak yaitu seperti anak terlantar, anak yang kurang mampu sehingga sulit mendapatkan pendidikan, anak yang sudah tidak mempunyai orang tua dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (1a), “kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Dijelaskan bahwa seharusnya anak mendapatkan kesejahteraan dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar dalam segala aspek. Sedangkan menurut Suharto (2006) dalam dr-sihnanto.blogspot.com, “kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial”.

Permasalahan sosial yang berkaitan dengan anak ini diatasi oleh organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (7), “Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Sedangkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan organisasi sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berfokus pada kesejahteraan sosial anak. Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 1 ayat (2), “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak”.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan fungsi dan tugasnya melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan pelatihan, pengelola dapat mengelola lembaganya dengan baik sehingga fungsi dan tugasnya sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat terpenuhi.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat (5), “Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”.

Sudjana (2007, hlm. 4) mengemukakan bahwa, “Pelatihan adalah upaya pembelajaran, yang diselenggarakan oleh organisasi (instansi Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya) untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan organisasi”. Sedangkan menurut Robinson (dalam Marzuki, 2010, hlm. 174) menyatakan “*training* adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku (pengetahuan, *skill*, sikap) agar mencapai sesuatu yang diinginkan”.

Permasalahan sosial yang terjadi pada anak sangatlah beragam sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu melakukan pelayanan seoptimal mungkin yang dapat mereka lakukan. Permasalahan sosial yang terjadi pada anak seperti kekerasan berupa pelecehan seksual, kekerasan fisik dan psikis masih sering terjadi. Tiga dari seratus anak Indonesia pernah mengalami kekerasan. Sejumlah 70,5% pelaku kekerasan terhadap anak lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak itu sendiri, misalnya orang tua, kerabat dekat, tetangga, hingga guru (Menkokesra,

2013 dalam nasyiah.or.id). Hal ini sangat memprihatinkan mengingat seharusnya rumah dan sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi anak, tetapi justru saat ini rumah dan sekolah menjadi salah satu tempat terjadinya permasalahan sosial bagi anak.

Indonesia juga masih memiliki problema penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dari 7300 ABH, 1615 anak ada di Lapas dewasa, dan tempat tahanan lainnya. Tentu hal ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa ABH memerlukan perlindungan khusus (KPAI, 2013 dalam nasyiah.or.id). Permasalahan sosial pada anak di Indonesia yang lainnya adalah perdagangan anak yang menyebabkan anak putus sekolah.

Angka putus sekolah anak perempuan tinggi hal ini dapat dilihat dari angka pendidikan anak perempuan hanya 7,1 tahun sedangkan anak laki-laki 7,9 tahun. Padahal negara sudah seharusnya menyediakan wajib belajar 9 tahun bagi semua anak Indonesia (UU PA, pasal 48). Memasuki dunia kerja dan putus sekolah rentan sekali menjadi penyebab utama anak terjerumus menjadi korban perdagangan anak. Komitmen penegak hukum dalam kasus perdagangan anak juga masih perlu ditingkatkan mengingat hanya 10% dari kasus perdagangan anak yang sampai di pengadilan (KPAI, 2013 dalam nasyiah.or.id).

Dengan banyaknya permasalahan sosial yang terjadi pada anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pengasuhan anak, maka diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pengelola LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam keluarga mengenai pengasuhan anak dan dapat mengurangi permasalahan sosial yang saat ini sedang marak terjadi kepada anak.

Kondisi yang ditemukan pada tempat penelitian yaitu Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Bandung adalah disana terdapat beberapa pelatihan yang dilaksanakan setiap tahunnya, ada pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dari pemerintah, pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan ada pelatihan yang langsung dilaksanakan oleh pusat namun bertempat di BPPKS Bandung. Peneliti memilih Pelatihan Manajemen Kesejahteraan Sosial Bagi Pengelola LKSA sebagai penelitian karena isu

Dewi Nur Rohmat, 2015

PERSEPSI ALUMNI TERHADAP PELATIHAN MANAJEMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI BBPPKS BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

permasalahan sosial pada anak yang sering terjadi saat ini semakin marak sehingga membutuhkan pelayanan yang sangat baik dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam mengentaskan permasalahan sosial yang terjadi pada anak.

Pelatihan Manajemen Kesejahteraan Sosial Bagi Pengelola LKSA yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Bandung merupakan Pelatihan yang ditujukan bagi pengelola agar dapat mengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan lebih baik. Pelatihan ini dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai pelatihan reguler yaitu pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan jumlah peserta 30 orang (1 Angkatan) berasal dari 6 (enam) provinsi wilayah kerja BBPPKS Regional Bandung yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten yang menjadi pengurus panti sosial anak, organisasi sosial, yayasan maupun LSM yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial anak.

Tujuan penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Kesejahteraan Sosial bagi Pengelola LKSA adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, sikap dan keterampilan pengelola dalam mengelola serta meningkatkan pelayanan LKSA. Namun sebagian peserta yang mengikuti Pelatihan Manajemen Kesejahteraan Sosial bagi Pengelola LKSA bukan pengelola LKSA. Beberapa peserta yang mengikuti pelatihan adalah peserta yang menggantikan pengelola yang sedang memiliki keperluan lain sehingga tidak dapat mengikuti pelatihan.

Davidoff dan Rogers dalam (Walgito, 2010, hlm. 100) mengemukakan bahwa “persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Persepsi itu bersifat individual”.

Berdasarkan pada uraian yang ada maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui “Persepsi Alumni terhadap Pelatihan Manajemen Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Bandung”. Penelitian ini dilakukan terhadap alumni peserta Pelatihan Manajemen Kesejahteraan Sosial bagi

Pengelola LKSA yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Bandung (BPPKS) Bandung.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pelatihan Manajemen Kesejahteraan Sosial berdasarkan aspek-aspek: materi pelatihan, metode pembelajaran, pelatih, peserta pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan, dan evaluasi pelatihan ?
2. Bagaimana persepsi alumni peserta Pelatihan Manajemen Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan Pelatihan Manajemen Kesejahteraan Sosial berdasarkan aspek-aspek: materi pelatihan, metode pembelajaran, pelatih, peserta pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan, dan evaluasi pelatihan.
2. Untuk mengetahui persepsi alumni peserta Pelatihan Manajemen Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat praktis dan teoritis.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi para mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah dalam mempelajari mengenai pelatihan pada suatu pelatihan yang dilaksanakan dalam lembaga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengembangan ilmu mengenai pengetahuan persepsi alumni pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian mengenai Pelatihan yang

diselenggarakan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung maupun di tempat penelitian yang hampir sama, yaitu tempat untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur Organisasi dalam penelitian ini merujuk pada pedoman karya ilmiah UPI (2014, hlm. 23-39) adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan yang didalamnya berisi tentang latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.
- BAB II** Kajian Pustaka, memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Teori pendukung dalam penelitian ini adalah konsep persepsi dan konsep pelatihan.
- BAB III** Metode Penelitian, pada pendekatan kuantitatif membahas tentang desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian serta analisis data.
- BAB IV** Temuan dan Pembahasan, menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
- BAB V** Simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat.